

Politik Etis: Dari Eksploitasi Ke Emansipasi di Era Kolonial

Rosmaida Sinaga¹ Salsabila Lubis² Nelman Wisabla³ Ulya Salisa Raunaq⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ salsakhairany332@gmail.com²
nelmanwisabla8@gmail.com³ ulyasalusarhunaq@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tokoh-tokoh politik etis, implementasi politik etis, perubahan struktur sosial dan ekonomi, kritik terhadap politik etis dan pengaruh politik etis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tokoh-tokoh politik etis. Adapun implementasi politik adalah irigasi, edukasi dan transmigrasi. Penerapan politik etis menyebabkan perubahan ekonomi dan perubahan sosial. Politik etis berpengaruh terhadap kebijakan Pendidikan dan Pembangunan infrastruktur dan menumbuhkan kesadaran nasional. Meskipun kebijakan politik etis tidak sepenuhnya menghapus eksploitasi, namun berhasil meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik di kalangan pribumi, yang pada akhirnya mendorong perjuangan menuju kemerdekaan.

Kata Kunci: Politik Etis, Eksploitasi, Emansipasi

Abstract

This article aims to find out ethical political figures, the implementation of ethical politics, changes in social and economic structures, criticism of ethical politics and the influence of ethical politics. The method used in this research is the historical method with four stages, namely heuristic, criticism, interpretation and historiography. Based on the research results, it is known that political figures are ethical. The political implementation is irrigation, education and transmigration. The application of ethical politics causes economic change and social change. Ethical politics influences education and infrastructure development policies and fosters national awareness. Although ethical political policies did not completely eradicate exploitation, they succeeded in increasing education and political awareness among natives, which ultimately encouraged the struggle for independence.

Keywords: Ethical politics, Exploitation, Emancipation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Politik Etis merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kritik keras terhadap eksploitasi yang dilakukan melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat pribumi, yang dipaksa menanam komoditas ekspor demi keuntungan kolonial. Pengertian kebijakan moral adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini disebut kebijakan kompensasi. Kebijakan moral atau kebijakan kompensasi merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda (*Fandy*). Pada akhir abad ke-19, muncul kesadaran di kalangan intelektual dan politikus Belanda mengenai perlunya perubahan kebijakan kolonial. Tokoh-tokoh seperti Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pelopor dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Van Deventer, dalam tulisannya yang terkenal "*Een Eereschuld*" (Hutang Kehormatan), menekankan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki

kondisi sosial dan ekonomi rakyat Hindia Belanda. Politik Etis, yang secara resmi diberlakukan pada tahun 1901, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi melalui tiga program utama: irigasi, edukasi, dan emigrasi. Program irigasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan membangun infrastruktur yang mendukung, seperti waduk dan saluran irigasi. Program edukasi berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi rakyat pribumi, dengan mendirikan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak pribumi. Sementara itu, program emigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dengan memindahkan sebagian penduduk ke daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Politik etis berfokus pada pengelolaan irigasi, pelaksanaan emigrasi, dan penyediaan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Meskipun politik etis mendorong kemajuan bagi bangsa Indonesia, kebijakan ini masih berada di bawah kekuasaan penjajahan Belanda. Awalnya, kebijakan ini dilaksanakan dengan tanggung jawab, di mana Belanda memberikan perhatian kepada rakyat lokal dan memberikan bantuan kepada Indonesia ketika menghadapi kesulitan. (Siagian, 2024) Meskipun kebijakan ini membawa beberapa perubahan positif, seperti peningkatan akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dari pihak kolonial maupun dari masyarakat pribumi sendiri. Namun, Politik Etis tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kolonial Indonesia, karena menandai awal dari perubahan paradigma dari eksploitasi menuju emansipasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah, teknik yang digunakan adalah penelitian sejarah. Secara historis, ini berarti penelitian sistematis terhadap sumber informasi lain yang mengandung informasi sejarah. Proses penelitian sejarah adalah mengkaji, menjelaskan dan memahami tindakan dan peristiwa masa lalu untuk menemukan kebenaran. Ada empat bagian dalam proses sejarah: penemuan, kritik, interpretasi, dan sejarah. (Gottschalk, 2008 : 39). Penelitian ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah. Peneliti menggunakan metode penelitian menurut Sejamuddin (2007:155-85), yaitu mengumpulkan sumber (eksplorasi), mengkritik sumber dan menafsirkan serta menulis sejarah. Heuristik merupakan metode pencarian. Tergantung pada sifat penyajiannya, sumber informasi utama adalah laporan, artikel, buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Saat ini data-data purbakala dapat diperoleh dengan berbagai cara, selain melalui penelitian kepustakaan, sumber-sumber sejarah juga dapat diperoleh dari media cetak dan elektronik. Penting bagi peneliti untuk mengetahui cara menangani bukti sejarah dan menghubungkannya. (Alian, 2012: 9-10). Menurut interpretasi, interpretasi menganalisis data historis. Dengan pernyataan tersebut, penulis mencoba menghubungkan fakta-fakta atau mencoba menjelaskan isi teks laporan penelitian ini. (Kuntowijoyo, 1994:100). Penafsiran fakta harus berdasarkan penalaran yang masuk akal. Meskipun terkadang Anda memiliki pikiran yang logis, bukan pikiran yang emosional. Konstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Historiografi adalah penyajian fakta dan signifikansinya dari waktu ke waktu dan secara sistematis dalam dokumen sejarah sebagai sebuah narasi. Kedua bagian uraian tersebut perlu dijelaskan secara gamblang, karena merupakan bagian dari karya sejarah ilmu pengetahuan dan hakikat sejarah sebagai ilmu. Sejarah merupakan perpaduan antara seni (art) dan pemikiran kritis serta analisis (sains). (Gottschalk, 2008 : 39-40)

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan moral pemerintah kolonial Belanda tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Gerakan moral membawa bangsa Indonesia maju, namun tetap berada di

bawah bayang-bayang kolonialisme Belanda. Kebijakan moral diputuskan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina memberikan pidato pada tahun tersebut. Awal mulanya dilakukan dengan tanggung jawab yang besar, dimana Belanda menjaga warganya dan membantu Indonesia ketika berada dalam kesulitan. Tidak ada keputusan yang baik dan tidak ada komitmen untuk melaksanakannya. Mereka melakukannya karena takut dikritik dan takut penderitaan masyarakat adat akan semakin meluas atau penolakan masyarakat akan terus berlanjut. (Daliman, A, 2012: 72).

Peran tokoh Politik Etis

1. Peter Broshoeft adalah seorang jurnalis dan penulis Belanda. Ia berkeliling Jawa pada tahun 1887. Ia pun mencatat kesulitan yang dihadapi penduduk asli Hindia Belanda saat itu. Kerugian yang dialami masyarakat adat disebabkan oleh kebijakan budidaya pangan. Selain itu, peternakan swasta juga menjadi sumber frustrasi bagi penduduk setempat. Kemudian Peter Broshoff menyerahkan 12 ke polisi Belanda. Salah satunya adalah sebuah buku. Judul bukunya adalah *Memorie Over den Toestand i Indie* yang artinya cerita tentang keadaan di India. Disebutkan dalam buku menentang pedagang dan pajak. Meski politik moral ini sudah ditata dengan baik, namun ia tetap kecewa. Implementasinya mengecewakan. Sebab menurutnya, penerapan kebijakan moral tersebut penuh kontradiksi. Kemudian dia kembali ke Belanda. Kepulangannya terjadi pada tahun 1904. Artikel Peter Bruschoffet ini menjadi salah satu inspirasi utama penerbitan Politik Moral. Selain karya lain seperti Max Havlar yang dirancang oleh Multatuli.
2. *Conrad Theodor van Deventer*



Van Deventer adalah seorang pengacara dari Belanda. Ia datang ke Indonesia untuk menjadi wirausaha di bidangnya. Dengan cara ini dia bisa menikmati kekayaannya. Namun meskipun dia menyukai hal tersebut, dia yakin dia membutuhkan perawatan yang lebih baik. Perlakuan baik ini diberikan kepada penduduk asli Hindia Belanda. Dan Van Deventer menulis *Een Eereshuld*, kehormatannya. Artikel ini ditulis pada tahun 1899. Artikel ini berarti Belanda mempunyai nomor kehormatan. Kehormatan ini juga harus dibayar. Selain itu, kekayaan didapat dari penderitaan penduduk pribumi. Ia pun menyelesaikan laporannya sebagai Anggota Parlemen. Laporan ini tentang situasi di Hindia Belanda. Dia menyerahkan laporannya kepada Sekretaris Koloni Edinburgh setempat. Selain itu, ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. 3. Edward Doves Decker punya nama lain, Multavali. Dia menulis buku berjudul *Max Havelar*. Buku ini menjelaskan seperti apa masyarakat kompak itu. Ia menilai masyarakat terjebak antara kepentingan kolonial Belanda dan agenda pemerintah daerah. Keduanya ingin mempertahankan kekuasaan. Ia juga meminta pemerintah memperkuat otoritas daerah. Sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang mensejahterakan rakyat. Ernest Douwe Dekker atau Setiabudi merupakan keturunan Edward Douwes Dekker. Dia berjuang untuk kelompok India atau campuran. Sementara itu, kalangan India terabaikan dalam politik moralitas. Orang India tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang dipilih untuk mendapatkan pendidikan

moral dan politik. Namun belajar di luar negeri sangat mahal bagi mereka. Ernest Douwes Dekker berharap pendidikan menjadi sesuatu yang dapat diakses oleh semua kalangan dan golongan.

Implementasi Kebijakan Politik Etis

1. *Irigasi*, Tujuan dari proyek irigasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membangun infrastruktur air. Pemerintah kolonial membangun waduk, kanal dan sumber air lainnya untuk mendukung pertanian dan perkebunan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar infrastruktur irigasi disalurkan ke pertanian swasta Belanda dibandingkan petani lokal. Infrastruktur irigasi membantu meningkatkan produksi pertanian, meskipun manfaatnya juga dirasakan oleh pertanian swasta Belanda. Pembangunan irigasi dan infrastruktur lainnya membawa perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia, termasuk bangkitnya kaum intelektual yang mulai menentang kolonialisme. Banyak skema irigasi yang digunakan untuk kebutuhan kolonial dan menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kebijakan moral tersebut, meskipun bertujuan baik, seringkali tidak sepenuhnya menjangkau masyarakat Indonesia dan sebagian besar dimanfaatkan oleh penguasa kolonial untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak pihak yang merasa bahwa penerapannya lebih menguntungkan pemerintah kolonial dibandingkan masyarakat Indonesia. Banyak petani yang kecewa dengan skema irigasi yang lebih cocok untuk pertanian swasta Belanda. Mereka seringkali terpaksa bekerja tanpa upah yang layak dan kehilangan tanah. Kebijakan politik moral, termasuk irigasi, membuka jalan bagi gerakan nasionalis yang menyerukan kemerdekaan dan keadilan sosial. Tokoh-tokoh seperti Sukarno dan Hatta mulai menentang kebijakan kolonial dan mengorganisir perlawanan politik. Ada pula protes dan demonstrasi oleh masyarakat yang merasa kebijakan ini tidak diperlukan. Mereka menginginkan kondisi kerja yang lebih baik dan pembagian keuntungan yang adil.
2. *Edukasi*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari penduduk Indonesia dengan membuat serangkaian sekolah. Sekolah-sekolah ini berbeda-beda berdasarkan ras, agama dan status, termasuk sekolah-sekolah Eropa, Arab, Cina, India, dan pribumi. Bahasa pengantarnya juga berbeda, misalnya Belanda atau Melayu lokal. Program pendidikan menghasilkan orang-orang terpelajar dari masyarakat adat yang menjadi otoritas nasional. Mereka mendirikan berbagai organisasi yang berjuang secara ideologi, intelektual, dan politik. Pendidikan membantu meningkatkan kesadaran nasional dan identitas unik Indonesia. Pendidikan merupakan sarana penyebaran ilmu pengetahuan, budaya dan nilai-nilai yang dapat mempersatukan berbagai bangsa Indonesia. Adanya pendidikan bagi masyarakat Indonesia mengubah cara pandang masyarakat untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial tidak ada bandingannya. Sekolah yang didirikan di kota lebih banyak dibandingkan di pedesaan, sehingga banyak anak di pedesaan yang tidak mengenyam pendidikan. Sistem pendidikan kolonial memisahkan sekolah berdasarkan ras dan status. Sekolah dasar di Eropa memiliki harga dan kualitas yang lebih baik dibandingkan sekolah lokal. Hal ini menyebabkan perpecahan sosial yang lebih besar. Kurikulum yang diajarkan sebagian besar bias dan menekankan pada kebutuhan perguruan tinggi. Sejarah dan kebudayaan Indonesia kurang dikaji secara mendalam, perhatian lebih banyak diberikan pada sejarah dan kebudayaan Belanda, dengan pendidikan pun hanya sedikit kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang baik atau untuk warga negara. Banyak lulusan sekolah yang terus bekerja di sektor tingkat rendah karena adanya diskriminasi dalam kesempatan karir.

3. *Emigrasi*, Tujuan dari program migrasi adalah untuk mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Madura dengan cara memindahkan penduduk tersebut ke daerah lain seperti Sumatera. Pemerintah kolonial berharap dengan memindahkan penduduk akan meningkatkan produktivitas di daerah baru dan mengurangi tekanan sosial dan ekonomi di Pulau Jawa. Kampanye migrasi berhasil memperluas penduduk dari Jawa dan Madura ke wilayah lain di Indonesia, khususnya Sumatera. Hal ini akan membantu mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa. Banyak pemukim pindah ke daerah baru untuk bekerja di perkebunan koloni. Mereka sering menghadapi situasi yang penuh kekerasan dan tekanan. Migrasi dapat menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi di daerah tujuan. Penduduk setempat harus beradaptasi dengan kedatangan penduduk baru yang seringkali membawa serta adat dan tradisi yang berbeda. Meskipun terdapat manfaat dari program pemukiman kembali, banyak warga yang merasa tertekan dan tidak puas dengan kondisi yang mereka hadapi di lokasi baru mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kebijakan kolonial. Kondisi kehidupan warga negara yang dimobilisasi melalui inisiatif kebijakan seringkali rumit dan penuh tantangan. Banyak orang dipindahkan untuk bekerja di perkebunan koloni. Mereka seringkali menghadapi kondisi kerja yang sulit, upah rendah dan hari kerja yang panjang. Di daerah-daerah baru, fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi seringkali kurang. Penghuni harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang kurang mendukung. Penduduk yang mengungsi sering kali ditindas oleh kekuatan kolonial. Mereka tidak punya banyak pilihan, mereka harus menerima kondisi yang ada, meski tidak adil. Penduduk lokal dan pendatang harus saling beradaptasi. Perbedaan adat dan tradisi menimbulkan konflik dan keresahan sosial. Banyak warga yang terpaksa pindah dan tidak menyukai kondisi yang akan mereka hadapi di lokasi barunya. Hal ini menyebabkan frustrasi dan penolakan terhadap kebijakan kolonial.

Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi

Perubahan ekonomi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830 memaksa petani pribumi bercocok tanam di luar negeri seperti kopi, gula, dan nila. Sistem ini dihapuskan pada tahun 1870 dan digantikan oleh sistem ekonomi terbuka yang memungkinkan masuknya modal asing. Indonesia menjadi tempat investasi berbagai negara seperti Inggris, Belgia, Perancis dan Amerika. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha asli kalah bersaing dan bangkrut. *Dalam perubahan sosial*, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok: Eropa, orang asing Timur (seperti Cina dan Arab), dan penduduk asli. Mobilitas sosial terjadi melalui perpindahan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Pada awalnya, akses terhadap pendidikan terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit. Namun pada awal tahun 1900-an, kebijakan moral dan politik mulai diterapkan, salah satunya adalah meningkatkan akses masyarakat Maori terhadap pendidikan. *Pengaruh peningkatan akses pendidikan* terhadap kesadaran masyarakat pulau Karena meningkatnya akses terhadap pendidikan, masyarakat terpelajar menjadi sadar akan jahatnya kolonialisme. Mereka menjadi badan pemerintahan negara dan memperjuangkan kemerdekaan. Baik pendidikan formal maupun informal berperan penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan. Baik pendidikan formal maupun informal berperan penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan. Kurikulum yang ketat dan metode pembelajaran yang inovatif membantu penanaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda. Organisasi seperti Bodi Otomo dan Circuit Islam yang didirikan oleh para intelektual menjadi wadah untuk menyuarakan tuntutan masyarakat.

Kritik terhadap implementasi dan efektivitas Politik Etis

Politik Etis, yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Namun, implementasi dan efektivitas kebijakan ini telah menjadi subjek kritik yang signifikan. Disini kami membahas tentang apakah kebijakan ini benar-benar mengarah pada emansipasi atau hanya bentuk lain dari kontrol kolonial.

1. Meskipun Politik Etis diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini lebih merupakan strategi untuk mempertahankan kontrol kolonial. Kebijakan ini dianggap sebagai cara untuk meredam ketidakpuasan dan potensi pemberontakan dengan memberikan sedikit perbaikan sosial dan ekonomi.
2. Meskipun ada peningkatan akses pendidikan, kebanyakan sekolah yang didirikan hanya tersedia untuk kalangan elit pribumi. Pendidikan yang diberikan juga lebih berfokus pada keterampilan administratif yang mendukung pemerintahan kolonial daripada pendidikan yang mendorong pemikiran kritis dan emansipasi.
3. Pembangunan irigasi dan infrastruktur sering kali lebih menguntungkan perkebunan dan industri milik Belanda daripada petani pribumi. Banyak proyek irigasi yang dirancang untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor yang menguntungkan Belanda.
4. Program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah lain sering kali hanya bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi perkebunan Belanda. Para transmigran sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa manfaat dari Politik Etis, banyak kritik yang menyatakan bahwa kebijakan ini lebih merupakan bentuk lain dari kontrol kolonial daripada upaya tulus untuk emansipasi pribumi. Kebijakan ini sering kali lebih menguntungkan pihak kolonial dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Beberapa tokoh yang memperjuangkan emansipasi pada masa penjajahan Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi dan menjadi simbol perjuangan untuk kesetaraan gender di Indonesia. Melalui surat-suratnya, yang kemudian dibukukan dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang," Kartini mengkritik ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan mendorong pentingnya pendidikan bagi perempuan. Selain Kartini, ada juga beberapa tokoh lain yang berperan penting dalam perjuangan emansipasi, seperti Dewi Sartika adalah tokoh pendidikan dari Jawa Barat yang mendirikan sekolah untuk perempuan, Sekolah Istri, pada tahun 1904. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan pribumi. Maria Walanda Maramis adalah tokoh dari Minahasa yang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ia mendirikan organisasi PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan perempuan. Nyai Ahmad Dahlan, istri dari pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, juga berperan penting dalam pendidikan perempuan. Ia mendirikan Aisyiyah, organisasi perempuan yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pengaruh jangka panjang dari Politik Etis

Pengaruh Jangka Panjang Politik Etis, Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan politik etis yang membuka kesempatan bagi masyarakat terhadap pendidikan, betapapun terbatasnya. Generasi kaum terpelajar kemudian muncul dan menjadi pemimpin nasional. Tokoh-tokoh seperti Sukarno, Hata, dan Sutan Sjahrir adalah contoh kaum intelektual yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pendidikan yang lebih baik menyebabkan terciptanya organisasi gerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi-

organisasi ini menjadi tumpuan kaum terpelajar untuk menyuarakan kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Pendidikan dan peningkatan akses terhadap informasi akan membantu membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat adat. Mereka mulai memahami pentingnya persatuan dan kemerdekaan dari wilayah jajahan. Pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan, meskipun pada dasarnya merupakan proyek kolonial, memberikan manfaat bagi penduduk asli. Infrastruktur ini mendukung pembangunan ekonomi dan mobilitas sosial yang lebih baik. Program transmigrasi yang diperkenalkan dalam kebijakan moral membantu mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan baru di luar Pulau Jawa. Meskipun konsep ini sering digunakan untuk tujuan kolonial, konsep ini juga membantu memperluas populasi dan mengembangkan wilayah baru.

Dampak terhadap Perkembangan Sosial dan Politik Pasca-Kolonial, Kesadaran nasional dikembangkan dalam kebijakan ini sebagai landasan pembentukan jati diri nasional Indonesia. Hal ini menyatukan berbagai ras dan budaya India dalam satu perjuangan kemerdekaan. Pendidikan yang diperkenalkan berdasarkan Kebijakan politik etis menjadi landasan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai bagian dari pembangunan negara. Pengalaman era politik moral mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia pascakolonial. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi dampak buruk sosial dan ekonomi akibat era kolonial melalui berbagai program pembangunan. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan moral mempunyai banyak kekurangan, kebijakan ini seringkali bermanfaat bagi pihak kolonial dan juga penting bagi pembangunan sosial dan politik Indonesia. Pendidikan dan pengetahuan nasional yang berkembang pada masa ini menjadi landasan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara pascakolonial.

KESIMPULAN

Politik Etis atau Kebijakan moral tersebut, meskipun diperkenalkan sebagai bentuk “rekonsiliasi” oleh pemerintah kolonial Belanda, namun menimbulkan dampak yang sulit dan beragam terhadap penduduk asli Hindia Belanda. Kebijakan ini, termasuk irigasi, pendidikan dan migrasi, di satu sisi memberikan banyak manfaat seperti peningkatan pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, kebijakan ini justru mempertegas penindasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat. Meningkatnya akses terhadap pendidikan melahirkan generasi terpelajar yang kemudian menjadi penggerak pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Sukarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir adalah contoh kaum intelektual yang berperan penting dalam perjuangan ini. Pendidikan juga membantu meningkatkan kesadaran nasional dan identitas nasional, yang menjadi landasan pembentukan pemerintahan Indonesia pasca-kolonial. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa banyak aspek dari kebijakan moral lebih menguntungkan pemerintah kolonial daripada masyarakat adat. Eksploitasi tenaga kerja melalui program imigrasi, ketergantungan ekonomi pada sistem kolonial dan pengabaian terhadap pengetahuan lokal merupakan contoh dampak negatif dari kebijakan ini. Secara umum politik etis merupakan politik yang penuh kontroversi. Kebijakan ini, selain menciptakan beberapa perubahan positif, juga memperkuat struktur buruh kolonial. Dampak jangka panjangnya terhadap gerakan kemerdekaan dan perkembangan sosial-ekonomi Indonesia pascakolonial menunjukkan bahwa pembebasan merupakan hasil perjuangan yang panjang dan sulit yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, politik moral dapat dilihat sebagai awal dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Meskipun kebijakan ini penuh kekurangan, namun mempunyai peranan penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyana, S. B. (2022). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 89-94.
- Arifin, F. (2020). Pembelajaran Sejarah Pada Masa Kolonialisme Belanda. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 126-153.
- Fandy. (N.D.). Pengertian Politik Etis: Program, Latar Belakang, Dan Tokoh Yang Terlibat.
- Hendri. (2017). Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia (1920-1945). *Diakronika*, 35-45.
- Ibrahimsyah, Z. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 91-106.
- M.Pd, D. A. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampau Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Manurung, E. S. (2024). Politik Etis Dan Munculnya Golongan Elit Modern Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 14-19.
- Muhasabah, N. (2021). Politik Etis Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Hinida Belanda. *Jurnal Pendidikan Dan Penekitian Sejarah*, 11-23.
- Poesponegoro, M. D. (2019). *Sejarah Nasioanl Indonesia IV*. Jakarta: PT Persero Penerbitan dan Percetakan.
- Prinada, Y. (2021, September). *Sejarah Politik Etis: Tujuan, Tokoh, Isi, Dampak Bala Budi*. Tirto.Id.
- Siagian, N. E. (2024). Politik Etis Sebagai Pemantik Awal Pembentukan Organisasi Pergerakan Nasional: Studi Kasus Budi Utomo. *JIMPS*, 625-635.
- Sinaga, R. (2020). *Kolonialisme Dan Multikuktaralisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Susilo, A. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal Historia*, 403-416.
- Tanjung, I. L. (N.D.). *Politik Etis. Masyarkat sejarah Indonesia*.